

CATATAN 61 TAHUN POLRI

Pencitraan Polri Bisa Di

PADA Hari Bhayangkara Tahun 2007 ini ada satu catatan penting yang patut menjadi renungan, setidaknya oleh kalangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Yakni, bagaimanakah sesungguhnya citra Polri di masyarakat.

Kita tak perlu menjawabnya secara eksplisit. Namun yang pasti jajaran kepolisian perlu bersikap lebih serius untuk kembali menata pencitraannya. Hal ini mengingat usia Polri sudah semakin tua, yakni memasuki 61 tahun.

Jadi pertanyaan memang, kenapa Polri sulit sekali untuk meraih kepercayaan masyarakat, padahal tugas pokoknya adalah sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat? Hal ini tak lain diakibatkan merebaknya krisis pencitraan di tubuh Polri. Krisis pencitraan ini telah pula berkembang menjadi krisis moral. Para pimpinan kepolisian seakan tak dapat membangun nilai-nilai keteladanan yang patut menjadi contoh ataupun acuan.

Melihat kenyataan itu, penataan pencitraan merupakan sesuatu yang strategis pasca Polri pisah dari TNI. Sebab, meski reformasi Polri sudah berjalan tujuh tahun, keberadaan Paradigma Baru Polri yang menginginkan lahirnya polisi sipil sebagai sahabat (mitra) masyarakat seakan belum menunjukkan hasil maksimal. Masyarakat masih saja mengeluhkan sikap, prilaku maupun kinerja Polri.

Hasil jajak pendapat yang dilakukan Indonesia Police Watch di tujuh kota, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya agaknya bisa menjadi bahan renungan. Survei yang dilakukan pada akhir 2006 hingga awal 2007 itu menyimpulkan ada delapan keluhan yang disampaikan masyarakat terhadap sikap, prilaku maupun kinerja aparat kepolisian.

Yaitu aparat kepolisian masih dinilai arogan, diskriminatif, koruptif (suka melakukan pungutan liar), lamban memberi respon, tidak tegas (terutama dalam menghadapi orang yang memiliki jalur kekuasaan atau memiliki uang), kurang transparan dalam memproses kasus, tidak ada mekanisme akuntabilitas, dan masih bermuansa budaya militer.

SENJATANYA SIMPATI MASYARAKAT

Kita tak perlu berpolemik terhadap berbagai keluhan yang dilontarkan masyarakat ini. Namun kita perlu mempertanyakan dan berkomitmen apa yang harus dilakukan untuk mengikis kesan negatif masyarakat tersebut. Apa yang harus dilakukan agar jajaran kepolisian Indonesia tidak lagi bergerak di antara terang dan gelap, di antara kelam dan harapan, yang kerap membuat masyarakat takut bersentuhan dengannya.

Apa yang harus dilakukan agar jajaran Polri makin menyadari bahwa mereka adalah abdi masyarakat. Politisi Cina Kuno, Wang An-



Shih mengatakan, orang berpendidikan akan memandang rendah orang-orang yang membawa senjata.

Apa yang dikatakan Wang ada benarnya. Sebab semakin terdidik sebuah bangsa semakin tinggi tuntutan mereka terhadap kedamaian. Anti kekerasan pun menjadi sebuah label kebenaran. Pakar kepolisian Sir Robert Mark juga mengingatkan, dalam era modern "senjata polisi bukan water canon, gas air mata, atau peluru karet melainkan simpati dari masyarakat".

Meraih simpati masyarakat, inilah yang harus dicapai Polri dalam era paradigma barunya. Untuk meraih impati masyarakat tak ada cara lain selain membangun, menata, dan mempertajam pencitraan Polri di masyarakat itu sendiri. Secara teoritis ada dua pencitraan yang perlu segera dibangun Polri; pencitraan ke dalam (internal) dan pencitraan ke luar (eksternal).

Dalam membangun pencitraan ke dalam ada enam hal strategis yang harus dilakukan. Yaitu, sejauhmana jajaran pimpinan Polri, mulai Kapolri hingga Kapolsek, dapat menunjukkan integritas yang tinggi kepada bawahannya. Sejahteranya budaya "setoran" dapat dibumihanguskan oleh segenap jajaran Polri. Sejahteranya merit system dapat dilakukan secara konsisten. Sejahteranya reward and punishment dapat dilakukan secara konsisten. Sejahteranya dunia pendidikan di internal Polri dapat menjadi teladan dan membebaskan diri dari berbagai tekanan maupun kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Sedangkan pencitraan keluar menyangkut sejauhmana jajaran Polri

mulai Dari Polantas



Oleh Neta S Pane*)

dapat menempatkan dirinya sebagai otoritas untuk melindungi dan bukannya menekan masyarakat. Sejuahmana jajaran Polri dapat bersikap dingin dan berani dalam menjalankan fungsinya. Sejuahmana jajaran Polri dapat menunjukkan kemampuan dalam mengendalikan sikap serta temperamen, sekalipun di bawah tekanan penghinaan maupun provokasi.

Sejuahmana jajaran Polri dapat memperlakukan masyarakat dengan penuh keadaban tanpa pandang bulu dan dengan senang hati memberikan bantuan kepada semua pihak yang membutuhkan. Sejuahmana jajaran Polri mau menghormati dan bersikap patuh pada hukum. Dalam urusan materiel dan uang, sejuahmana jajaran Polri dapat bersikap jujur, dapat dipercaya, baik dalam hal kejahatan maupun barang yang dipercayakan kepadanya. Yang terakhir sejuahmana jajaran Polri dapat menghayati bahwa "kejujuran adalah kebijakan yang paling baik dan bersikap jujur tidak membuat seorang polisi terkubur".

Dengan tumbuh dan berkembangnya pencitraan tersebut masyarakat tidak lagi melihat kepolisian sebagai suatu dunia yang senantiasa "cacat" dan sebuah dunia penuh rasa khawatir jika bersentuhan dengannya. Sebab, inti dari pencitraan yang akan diraih jajaran kepolisian, baik di internal maupun eksternal, adalah sejuahmana aparat kepolisian dapat membangun hubungan baik antar sesama maupun dengan masyarakatnya, melalui hubungan timbal balik yang saling menghormati, saling mempercayai, dan saling memberi serta menerima prestasi.

Dengan demikian masing-masing aparat Polri dapat senantiasa melakukan tindakan dari hati ke hati dan menunjukkan bahwa tindakannya memang tulus, jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk memberikan keamanan, menjaga keselamatan, melayani, melindungi serta membimbing masyarakat. Artinya dalam setiap bertindak masing-masing anggota Polri menyadari bahwa dirinya benar-benar menjadi sahabat sejati masyarakat.

Seperti kata pakar sosial Parsudi Suparlan, polisi yang modern dan demokratis adalah polisi sipil dengan birokrasi yang modern dengan system yang impersonal dan untuk menjadi profesional anggota kepolisian harus senantiasa memahami corak masyarakat dan kebudayaannya. Dalam konsep Paradigma Baru Polri, kebijakan Kapolri Jenderal Sutanto sendiri sudah diarahkan untuk mewujudkan polisi sipil yang modern dan demokratis.

Untuk mewujudkan hal ini langkah-langkah yang dilakukan antara lain adalah mengubah mindset anggota Polri. Hal ini dilakukan dengan membuat pedoman tatacara penunjukan anggota, penyederhanaan kepankangan, pedoman rekrutmen taruna Akademi Kepolisian, mengembangkan sistem pendidikan, membuat tatacara penilaian anggota, dan lainnya.

UJUNG TOMBAK

Melihat lambannya perjalanan reformasi dan Paradigma Baru tampaknya jajaran kepolisian perlu kembali mempertajam konsepnya, dengan mengedepankan penataan pencitraan. Mabes Polri perlu menjabarkan konsep pencitraan ini dengan beberapa tahapan kepada anggotanya, mulai dari tahapan pemberitahuan, pemahaman, pemanfaatan, dan pengembangan.

Untuk mendukung konsep pengembangan pencitraan ini, Polri perlu melakukan berbagai pilot proyek. Dalam hal ini jajaran aparat Kepolisian Lalulintas (Polantas) dapat dijadikan ujung tombak pilot proyek pencitraan tersebut.

Kenapa harus Polantas? Hal ini mengingat Polantas adalah etalase Polri. Setiap saat masyarakat selalu bersentuhan dengan aparat Polisi Lalulintas. Bahkan, ketika baru memulai aktivitasnya di pagi hari banyak anggota masyarakat yang langsung bersentuhan dengan aparat Polisi Lalulintas, baik di jalanan maupun di terminal-terminal. Sebab itu tak salah jika dikatakan Polantas adalah etalase Polri.

Keberadaan Polisi Lalulintas yang sangat strategis ini sesungguhnya dapat dijadikan Polri untuk menata dan menjalin kedekatan maupun keakraban masyarakat dengan polisi. Persoalannya, bagaimana Polri selama ini memposisikan keberadaan aparat Polisi Lalulintas sebagai etalasanya? Apakah sudah prima atau seadanya atau bahkan alakadarnya? Tampaknya Polri perlu lebih intensif lagi dalam menata tugas-tugas strategis yang diemban jajaran Polisi Lalulintas ke masa depan, terutama dalam menjalankan konsep reformasi dan Paradigma Baru Polri.

Dengan kata lain, sudah saatnya Mabes Polri bersikap hanya kader-kader terbaiknya yang akan ditempatkan di jajaran Polisi Lalulintas. Tujuannya agar kader-kader terbaik tersebut dapat menata dan membangun citra Polri di tengah-tengah masyarakat.

Dengan keberadaan aparat Polisi Lalulintas di jalanan, di terminal maupun di sudut-sudut strategis lainnya masyarakat merasa terlindungi. Sehingga mereka selalu merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas.

Masyarakat tidak merasa khawatir lagi jika berhadapan dengan aparat kepolisian, terutama Polisi Lalulintas. Bahkan mereka merasa Polisi Lalulintas adalah sahabat sejatinya di jalanan. Jika citra ini sudah terbangun, reformasi dan Paradigma Baru Polri pun mulai mencapai hasilnya. Semoga saja.

Dirgahayu Polri.

*) Ketua Presidium Indonesia Police Watch